# INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH

INTEGRATION OF SDGs TARGET AND INDICATORS INTO REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN CENTRAL JAVA

#### **Arif Sofianto**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda 127-133 Semarang Email: 01arifsofianto@gmail.com

Diterima: 31 Mei 2019, Direvisi: 21 Juni 2019, Disetujui: 12 Juli 2019

### **ABSTRAK**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tantangan berat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tingkat daerah, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan menemui banyak tantangan, karena sebagian indikator belum sesuai dengan kondisi daerah, serta ketersediaan data-data yang sangat terbatas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Jawa Tengah, dengan mengambil kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan. Informan penelitian ialah pihak yang memiliki kewenangan menyusun perencanaan pembangunan, serta aktor nonpemerintah. Teknik analisis data menggunakan model inetraktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan SDGs hanya dimaknai sebagai kegiatan BAPPEDA, serta di dalam penyusunan rencana aksi masih sangat sedikit program pemerintah maupun nonpemerintah yang diintegrasikan. Kendala lain adalah lemahnya komtimen antar stakeholder, baik di dalam sharing data dan sumberdaya, perumusan program dan penyusunan rencana aksi. Oleh sebab itu disarankan agar SDGs sebagai milik bersama dimulai dari komitmen kepala daerah, baik dalam hal sharing program, penguatan komitmen antar pihak, membangun tim solid dalam rangka penyediaan basis data dan program kegiatan, komunikasi dan sinkronisasi.

Kata Kunci, SDGs, perencanaan, pembangunan, daerah

### **ABSTRACT**

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a tough challenge for developing countries, including Indonesia. At the regional level, the integration of SDGs into development planning faces many challenges, because some indicators are not yet in accordance with regional conditions, as well as very limited data. The purpose of this study is to analyze the integration of SDGs indicators into development planning carried out by local governments in Central Java. This research is a qualitative descriptive study. The research location is in Central Java, taking the case in the Central Java Provincial Government, as well as the Pekalongan District Government, Pemalang District, Wonosobo Regency, and Grobogan Regency. Research informants are those who have the authority to develop development plans, as well as non-government actors. The data

analysis technique uses the interactive model as developed by Miles and Huberman. The conclusion of this study is that the implementation of SDGs in Central Java, both at the provincial and district / city levels is still not optimal, because SDGs are only interpreted as BAPPEDA activities, and in the preparation of action plans there are still very few government and non-government programs integrated. Another obstacle is the lack of commitment among stakeholders, both in sharing data and resources, formulating programs and preparing action plans.

Keywords: SDGs, planning, development, region

### **PENDAHULUAN**

Negara-negara berkembang dihadapkan pada tuntutan pencapain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam periode 2016 - 2030. Kesepakatan tentang SDGs disahkan dalam pertemuan tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Pada tanggal 2 Agustus 2015 dokumen SDGs telah disepakati dalam pertemuan yang dihadiri 193 negara dengan judul "Transforming Our World: 2030 Agenda for The Sustainable Development" (Ishartono, 2016).

SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. MDGs sangat birokratis dan eksklusif tanpa melibatkan unsur nonpemerintah, sedangkan SDGs memiliki tujuan luas dan tuntas, mengakomodasi unsur nonpemerintah, serta bersifat universal. SDGs disusun melalui proses partisipatif, sangat inklusif dengan cara konsultasi dengan semua kalangan (pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, pihak swasta dan masyarakat filantropi), baik dari negara maju maupun berkembang (SMERU, 2017). SDGs menekankan kesetaraan antar-negara dan antar-warga negara (Hoelman, dkk, Infid, 2015). Sifat inklusif juga tercermin dari adanya prinsip "no one left behind", tidak ada satupun pihak yang tertinggal/ terpinggirkan. Dari aspek tujuan, jika sebelumnya **MDGs** berorientasi

mengurangi, paling tidak setengahnya, namun di dalam SDGs target capaian adalah menghilangkan samasekali, bersifat "Zero Goals".

Tujuan Pembangunan Milenium/ SDG's menekankan pada 5P yaitu: People (manusia), Planet (bumi), (perdamaian), Prosperity (kesejahteraan), dan Partnerships (kemiteraan). Tujuan akhir di tahun 2030 program SDG's untuk mencapai tiga tujuan mulia berupa: mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator dalam skala global. Target dan indikator tersebut tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik (Panuluh & Fitri, 2016). Namun tidak semua indikator sesuai untuk Indonesia, dan juga ditingkat daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Selain itu Tim Sekretariat Nasional SDGs (Bappenas) juga telah menyusun panduan metadata nasional. Terdapat 319 indikator nasional yang sudah diidentifikasi, dan 235 diantaranya sesuai untuk tingkat provinsi. Di Indonesia, 17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam 4 pilar, yaitu; (1) pilar sosial berisi 5 tujuan; (2) pilar ekonomi berisi 5 tujuan; (3) pilar lingkungan berisi 6 tujuan; (4) pilar hukum dan tata kelola berisi 1 tujuan.

Dengan semakin tingginya target capaian, serta bertambahnya tujuan di dalam SDGs memerlukan kerja keras semua pihak. Sebagai perbandingan, berdasarkan laporan Bappenas, bahwa pelaksanaan di MDGs di Indonesia dari 67 indikator, sebanyak 49 indikator telah tercapai dan 18 belum tercapai. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala di dalam pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Di era SDGs memerlukan upaya lebih karena tujuan yang diharapkan adalah menghilangkan sama sekali, serta bersifat inklusif dan keterlibatan semua.

SDGs/TPB merupakan komitmen yang pembangunan global diimplementasikan ke dalam pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah pusat daerah melakukan pemerintah beberapa langkah untuk mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB/SDGs), pasal 15 bahwa "Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs bersama-sama kabupaten/kota dengan pemerintah melibatkan berbagai unsur terkait.

Sekretariat Nasional SDGs telah menyusun metadata nasional tentang SDGs yang bisa digunakan sebagai panduan bagi pemerintah daerah. Metadata tersebut memuat target dan indikator nasional yang sebagian sama persis dengan indikator global, sebagian merupakan proksi atau pengembangan dari

indikator global. Di dalam dokumen metadata tersebut telah dijelaskan konsep, sumber data dan disagregasi data baik untuk tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Di dalam panduan metadata tersebut, keseluruhan terdapat 319 indikator TPB/SDGs nasional yang dikembangkan dari indikator global awalnya sejumlah 241.

Dari 319 indikator nasional tersebut, daerah dwajib menetapkan indikatornya, atau membuat proksi sendiri, sebagian indikator yang datanya sudah dihitung oleh BPS, wajib masuk dalam Rencana Aksi Daerah. Pemilihan indikator di daerah didasarkan panduan metadata tersebut memperhatikan nasional disagregasi data (nasional, provinsi dan Dengan berdasarkan kabupaten/kota). panduan metadata data tersebut. pemerintah provinsi dapat mengetahui potensi ketersedaan data di lingkup urusan masing-masing sebagai dasar penyusunan rencana aksi daerah.

Dalam hal mengadopsi target dan indikator global maupun nasional ke dalam RAD, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Pertama adalah disagregasi data sebagaimana tercantum di dalam panduan metadata nasional. Disagregasi ini menunjukkan ketersediaan data yang sudah terpilah di tingkat, provinsi maupun kabupaten/kota, dimana setiap tingkatan daerah memiliki disagregasi data yang berbeda. Kedua adalah kewenangan pemerintah daerah, dimana akan menjadi pertimbangan dalam menentukan setiap indikator sesuai dengan kewenangannya. Kesesuaian ini akan membantu integrasi target dan indikator ke dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah. Ada beberapa target dan indikator yang dalam disagregasi data terdapat di provinsi atau kabupaten/kota, tetapi dalam perencanaan tidak bisa menargetkan output-nya karena merupakewenangan pemerintah kan pusat.

Contoh tentang kasus kejahatan, kasus hukum dan HAM, penerbitan akta tanah merupakan urusan pemerintah pusat yang disagregasi datanya ada di tingkat provinsi. Urusan lain adalah pendidikan dasar vang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota pendidikan meniadi tinggi yang kewenangan pemerintah pusat namun disagregasi data ada di tingkat provinsi. Kewenangan yang berbeda ini sebenarnya tidak menjadi penghambat masuknya target atau indikator dalam RAD, namun integrasinya akan membatasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketiga adalah ketersediaan data sesuai target dan indikator. Banyak target dan indikator yang datanya tidak tersedia pada instansi menangani. vang Keterbatasan ketersediaan data ini membuat suatu indikator sulit diukur dan dimasukkan dalam RAD SDGs.

Ada beberapa tipe indikator yang berhasil diidentifikasi oleh Sekretariat nasional SDGs. vaitu: 1) Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global merupakan indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator global (contoh: Angka Kematian Ibu); 2) Indikator nasional sebagai proksi indikator global, yaitu indikator nasional yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator global (zontoh: air minum dan sanitasi layak); 3) Indikator global yang dikembangkan, yaitu indikator global yang belum dimiliki Indonesia dan belum ada proksinya di nasional karena metadata global belum tersedia (contoh: keasaman (pH) laut); serta 4) indikator global yang tidak relevan di Indonesia.

Di tingkat daerah, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah menemui banyak tantangan. Banyak indikator yang belum terdapat di dalam dokumen perencanaan pemba-

ngunan daerah, serta data-data yang sangat terbatas. Di dalam melakukan hal tersebut, memperhatikan **RPJMN** RPJMD tahun berjalan, Renstra OPD tahun berjalan, RKPD dan Renja OPD berjalan, Laporan Pencapaian MDGs, serta dokumen kebijakan lain yang terkait (RAD GRK, RAD PG, RAD HAM dll). Dari aspek perencanaan, SDGs juga bukan menjadi satu-satunya tujuan, karena ada berbagai kepentingan. Meskipun pemerintah kabupaten/kota diwajibkan menyusun RAD, namun peran dan kontribusinya sangat penting di dalam pencapaian tujuan SDGs. Kabupaten/kota merupakan ujung tombak implementasi program pembangunan, termasuk pencapaian SDGs. Di sisi lain, terdapat berbagai keterbatasan, serta banyaknya tuntutan kepentingan politik lain. kabupaten/kota Pemerintah iuga dihadapkan pada permasalahan bagaimana mengintegrasikan **SDGs** ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mensinergikan bagaimana tuntutan pencapaian SDGs dengan tuntutan politis dari masyarakat, kebutuhan pembangunan daerah dan potensi serta permasalahan daerah. Menurut Suzetta sebagaimana M. Ikbal Bahua perencanaan sebagai sebagai cerminan demokratisasi dan partisipasi dilakukan melalui proses partisipatif yang diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut.

Oleh karena itu, di penyusunan RAD serta pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan pembangunpemerintah daerah, daerah akan menghadapi berbagai permasalahan, terutama merumuskan indikator SDGs di daerah dimana banyak indikator global maupun nasional yang tidak sesuai atau tidak terdapat data pendukung, serta sebagian tidak relevan. Kesulitan juga dialami ketika harus mengintegrasikan kegiatan lembaga nonpemerintah ke dalam RAD SDGs.

Hasil studi UNDP (2015), menyimpulkan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam integrasi target SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Data harus dikumpulkan dalam satu bank data. Untuk data tertentu perlu dikembangkan metode tambahan seperti wawancara mendalam, survei, diskusi kelompok fokus dan pertimbangan ahli.
- Melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan agar adopsi SDGs selaras dengan pembangunan nasional.
- 3. Di dalam merumuskan indikator SDGs data harus dapat diverifikasi, indikator harus jelas, sederhana, mudah untuk dikumpulkan, mudah ditafsirkan dan disampaikan.
- 4. Indikator yang digunakan harus fokus pada hasil seperti mengakhiri kemiskinan ekstrim.
- Penentuan indikator dan koordinasi data lebih baik dilakukan oleh badan khusus

Menurut hasil kajian Panuluh dan Fitri (2016), SDGs di Indonesia lebih baik dibading MDGs dalam hal ketepatan waktu dan proses yang partisipatif, adapun tantangannya adalah substansi tujuan SDGs yang ambisius, serta dari aspek proses berupa mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak pemerintah, dan proses partisipasi. Oleh peran aktif pemerintah karena itu, merupakan modal utama keberhasilan SDGs.

Menurut hasil penelitian Aidha, dkk (2019) tentang "Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan

Kabupaten Kepulauan, Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan" menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan SDGs dan pencapaian indikator-indikatornya tidak hanya bertumpu pada keberadaan instrumen seperti Rencana Aksi Daerah atau kelompok kerja. Kesiapan juga ditentukan oleh harmonisasi program pemerintah, pengukuran dan pengawasan, serta pemahaman masyarakat tentang SDGs dan bagaimana cara mencapainya (Aidha, dkk 2019).

Terkait dengan persoalan tersebut di atas, diperlukan kajian dalam rangka memberikan kontribusi pada integrasi indikator SDGs tersebut ke perencanaan pembangunan daerah. Setiap daerah memilki persoalan pembangunan masing-masing, di sisi lain juga memiliki keterbatasan sumberdaya. merupakan salahsatu tugas berat bagi daerah untuk merealisasikannya di dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis persoalan dan solusi yang diperlukan dalam integrasi tersebut baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di Jawa Tengah.

Permasalahan yang penting untuk adalah bagaimana pemerintah dikaji daerah melakukan integrasi indikator SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah, di sisi lain pemerintah daerah memiliki kebutuhan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak semua indikator SDGs relevan di daerah, tidak semua indikator tersedia datanya di daerah, tidak semua daerah memiliki sumberdaya anggara dan manusia yang memadai, aspirasi masyarakat, masalah lain seperti kepentingan politik pembangunan daerah.

# **METODE PENEITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui keadaan sesuatu (Suharsini Arikunto, 2002), dimana data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009). Sifat penelitian ini ialah terapan karena hasilnya langsung diaplikasikan (Daniel, dkk, 2005). Lokasi penelitian di Jawa Tengah, dengan mengambil kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Pekalongan, Kabupaten Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan. Dasar pemilihan dukungan lokasi ialah komitmen pencapaian SDGs bagi masing-masing daerah itu dalam perencanaan pembangunan daerah. Subjek penelitian ialah para pemangku kepentingan SDGs dengan informan pihak-pihak memiliki kewenangan menyusun perencanaan pembangunan, serta pihak nonpemerintah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer berasal wawancara dan diskusi dengan para informan yang berisi proses pelaksanaan tugas yang terkait perumusan indikator SDGs di daerah. Data sekunder berasal dari dokumen terkait objek penelitian. digunakan Instrumen vang dalam penelitian ini ialah form isian, FGD dan panduan wawancara terbuka. informan diminta mengisi data dalam form yang disediakan sesuai dengan kondisi instansinya. Kemudian informan tersebut terlibat dalam FGD yang dilakukan sebanyak 4 kali berdasarkan dengan isu dalam pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Informan tertentu diwawancara mendalam, yaitu anggota sekretariat SDGs. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan dan analisis kualitatif model interaktif. Analisis model inetraktif sebagaimana

dikembangkan Miles dan Huberman, dimana proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data secara simultan untuk menghasilkan kesimpulan yang saling terkait (Husaini dan Purnomo, 2008).

# HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil

**SDGs** Penyusunan RAD mengunakan 2 metode utama yang ditempuh sesuai kondisinya. Pertama dalam kondisi RPJMD sedang berjalan, maka penyusunan RAD SDGs dilakukan dengan taging atau penandaan program dan kegiatan dalam RPJMD yang sesuai dengan target dan indikator SDGs, kemudian dimasukkan ke dalam RAD SDGs. Program dan kegiatan perlu ditambahkan dari pihak nonpemerintah untuk memperkaya program dan kegiatan yang mendukung SDGs. Kedua adalah dalam kondisi RPJMD akan memasuki periode baru, dimana sesuai ketentuan Perpres 59 Tahun 2017, RAD SDGs menjadi masukan bagi program dan kegiatan di dalam RJMD tersebut. RAD SDGs disusun sebelum RPJMD agar bisa menjadi masukan RPJMD dan RKPD. RAD SDGs berisi usulan program dan kegiatan baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi), urusan pemerintah pusat di daerah, serta lembaga lain seperti LSM, organisasi keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan lainnya, dan perguruan tinggi. Dalam rangka penyusunan RPJMD dan RKPD, program dan kegiatan bisa merujuk pada RAD yang sesuai.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyusun RAD SDGs untuk periode 2017-2018, sesuai dengan masa berakhirnya RPJMD (periode kepala daerah) sejak Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 dikeluarkan. Di dalam RAD SDGs Jawa Tengah 2017-2018 terdapat 79 target dan 191 indikator yang diadopsi dari

total 235 indikator yang memiliki disagregasi data di wilayah provinsi. Proses penyusunan RAD tersebut dilakukan melalui taging atau penandaan terhadap program yang ada di RPJMD. Sebagian indikator nasional diterjemahkan ke dalam indikator daerah dengan beberapa penyederhanaan. Masih terdapat sebanyak 42 indikator yang belum diadopsi oleh RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah periode 2017 - 2018.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa RAD SDGs bukan merupakan produk politik yang disusun menggunakan pertimbangan teknokratik, politis, bottom up dan top down, tetapi lebih bersifat teknokratik dan konsensus antar unsur. RAD SDGs diharapkan muncul sebelum RPJMD sebagai salahsatu bahan masukan. RAD SDGs memiliki kekuatan politik dan konsekuensi administratif di dalam implementasinya. RAD SDGs juga mengakomodasi kegiatan lembaga nonpemerintah di daerah, atau lembaga pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu. RAD SDG semestinya mencakup spektrum yang lebih luas dibanding dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan RKPD. Di sisi lain RPJMD sebagai produk politik disusun melalui proses politik yang berlangsung dalam beberapa tahapan, membawa visi dan misi bersifat politik, serta ditetapkan melalui kompromi politik.

Di sisi lain, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tetapi belum sinkron dengan SDGs. Oleh sebab itu, di dalam penyusunan RPJMD dan RKPD, potensi perogram dan kegiatan setiap OPD sebaiknya diselaraskan dengan SDGs dalam penentuan target dan output kegiatan.

Secara umum, ada beberapa fenomena yang kemudian muncul terkait dengan perumusan RAD SDGs dan integrasi di dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama adalah kesulitan ketersediaan data dikarenakan beberapa indikator sangat spesifik, serta memerlukan perpaduan data dari berbagai sumber data untuk satu indikator, di sisi lain kadang kala data antar berbagai sumber tidak sinkron. Contoh indikator proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, penyandang disabilitas, lansia. hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. Indikator tersebut memerlukan integrasi berbagai sumber data dari berbagai instansi daerah dan pusat. Indikator lain seperti proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan, juga memerlukan sumber data yang sangat spesifik, serta memerlukan sinkronisasi antar sumber data.

Kesulitan lain adalah proses pengumpulan data dari OPD lain, lembaga pemerintah pusat di daerah, atau lembaga nonpemerintah dan perguruan tinggi. Sebagaimana amanat SDGs adalah melibatkan semua pihak, dimana program dan kegiatan *stakeholder* tersebut juga harus diarahkan untuk pencapaian SDGs.

Problem sulitnya pengumpulan data disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ketersediaan, dan kurangnya kepedulian. Data sulit terkumpul karena memang data tidak tersedia atau buruknya pendataan di suatu instansi sumber data. Sebagaimana disampaikan gurubesar Undip Prof. dr. Fatimah Muis, M. Sc dalam FGD, bahwa data merupakan komponen penting di dalam menjalankan suatu agenda kegiatan, namun pengumpulan data yang akurat dilakukan karena kurangnya sulit komitmen instansi. Kurangnya kepedulian terhadap SDGs menyebabkan permintaan data dari tim SDGs kurang mendapat perhatian. Hal ini juga mengindikasikan bahwa SDGs belum dianggap sebagai milik bersama pelaksana SDGs. Baik di tingkat provinsi maupun di semua daerah kabupaten/kota, SDGs masih dianggap sebagai kegiatan milik Bappeda, sehingga yang mengetahui dan peduli hanya Bappeda.

masalah Kedua, identifikasi indikator yang sesuai untuk daerah. Baik global maupun indikator metadata nasional sebagian masih terlalu sulit untuk digunakan di level daerah. Sebagian indikator memiliki keterbatasan data di daerah sehingga dilakukan penyesuaian atau perubahan kategori data. Contoh di level nasional (sesuai panduan meta data) tertulis indikator (1.3.1.c) "Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas", kemudian disesuaikan di indikator daerah menjadi "Persentase penyandang disabilitas miskin". Namun di dalam RAD SDGs Jawa Tengah 2017-2018 ditulis jumlah disabilitas miskin, bukan persentase, karena kesulitan mencari data totalnya. Indikator (1.4.1.k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN, namun dengan keterbatasan data, di dalam RAD SDGs Jawa Tengah 2017 -2018 diubah menjadi "Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin", bukan persentase.

Masalah indikator lainnya adalah indikator yang tidak kongruen antara meta nasional data dan indikator yang digunakan di daerah. Contoh Indikator (1.5.1.e) Indeks risiko bencana pada pusatpusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, diubah menjadi jumlah "Desa Tangguh Bencana". Indikator (3.2.2\*)Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup, diganti menjadi "cakupan *neonatal* komplikasi yang ditangani".

Selain itu, terdapat beberapa indikator nasional yang dibuat proksi di tingkat provinsi. Contoh indikator (2.1.1\*) tentang 'Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence *Undernourishmen)*', dibuat proksi menjadi 'ketersediaan pangan utama beras (ton)'. Indikator (2.1.2\*) tentang 'prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat', berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan, menjadi dibuat proksi *'persentase* Penanganan Daerah Rawan Pangan'. Indikator (3.2.2.b)'persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi, dibuat proksi menjadi Cakupan UCI desa'. Indikator (3.3.a)tentang ʻjumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria, dibuat proksi menjadi 'Angka Kesakitan Malaria'. Indikator (5.1.1\*)ʻiumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan', dibuat proksi menjadi 'rasio kabupaten/kota menerapkan yang kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD'.

Selain masalah di daerah, beberapa konsep target dan indikator SDGs sendiri sebagaiaman tertuang dalam meta data nasional terdapat *overlap* antar target maupun indikator. Misalnya antara target 6.1 dengan 6.4 tentang air minum. Beberapa indikator juga overlap seperti: indikator (1.4.1.a) dengan (3.1.2.a) yaitu Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan yang diproksi di tingkat provinsi menjadi "Cakupan Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan".

Dari aspek sumberdaya, secara umum implementasi SDGs di Jawa Tengah juga masih menghadapi masalah pendanaan. Tuntutan program yang

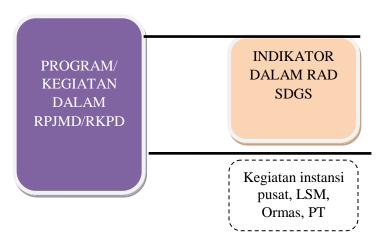
ambisius tersebut tidak mampu dipenuhi oleh angaran pemerintah daerah semata. Oleh karena itu memerlukan bantuan pihak lain, terutama pihak swasta. Hanya saja, di dalam RAD SDGs Jawa tengah 2017-2018 juga belum memuat program kegiatan lebaga nonpemerintah tersebut. Pada dasarnya RAD SDGs merupakan pernyataan komitmen, oleh sebab itu perlu memasukkan unsur nonpemerintah provinsi (pemerintah pusat di Jawa Tengah, swasta, masyarakat, tinggi, perguruan LSM) di dalam pendanaan. Beberapa potensi swasta seperti kegiatan CSR, kontribusi LSM dalam advokasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana kegiatan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian beberapa tujuan.

Selain itu pihak perguruan tinggi misalnya dengan kegiatan pengabdian masyarakat tentu memberikan kontribusi nyata sesuai dengan bidangnya. Kegiatan KKN atau pemberdayaan masyarakat merupakan sumber penting di dalam memberdayakan masyarakat melalui potensi yang mereka miliki. Sayangnya kegiatan tersebut belum masuk dalam RAD.

Potensi lain berasal dari lembaga Islam yang mengelola zakat, infaq dan sedekah. Lembaga seperti BAZNAS dan LAZNAS tentu memiliki sumberdaya yang sangat besar untuk bisa dialokasikan kepada pencapaian SDGs. Program dan kegiatan lembaga-lembaga tersebut sangat sejalan dengan sebagian besar tujuan SDGs, terutama pilar sosial. Disayangkan bahwa program dan kegiatan tersebut juga belum pararel dalam RAD SDGs Jawa Tengah 2017-2018.

Selain sumber di atas, sebagaimana disampaikan Feri Aji (Komisi Penanggulangan AIDS), bahwa Dana Desa juga menjadi potensi pencapaian SDGs. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, bahwa antara 10-50 persen dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan tersebut tentunya bisa mndukung SDGs. Selama ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendudukan dan Catatan Sipil (Permasdes Dukcapil) Provinsi Jawa Tengah sudah menyediakan pendamping desa tetapi fungsinya belum kuat untuk mengarahkan ke SDGs.

Sesuai dengan gambaran kondisi di menggambarkan kondisi atas bahwa pemaknaan SDGs masih sangat sempit, hanya sebatas kegiatan instansi pemerintah, khususnya Bappeda. RAD SDGs hanya berisi program dan kegiatan pemerintah daerah, di sisi lain banyak prorgam dan kegiatan nonpemerintah yang masih belum masuk. Bahkan di dalam RPJMD atau RKPD sendiri pun, masih banyak program dan kegiatan yang tidak tercantum di dalam RAD SDGs. Dengan masih banyak demikian. potensi sinkronisasi antara RAD SDGs dan RPJMD/RKPD yang masih bisa digali.



Gambar 1 Kondisi Sinkronisasi SDGs dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah

Gambar di atas menunjukkan bahwa indikator SDGs yang digunakan di Jawa Tengah masih sebatas program dan kegiatan yang tercantum di dalam RPJMD. Adapun kegiatan di luar RPJMD yang dilakukan oleh instansi pemerintah puat di Jawa Tengah, masyarakat, LSM, Ormas, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga lain belum menjadi bagian dari RAD.

Dinamika SDGs di tingkat kabupaten dan kota juga hampir sama dengan di tingkat provinsi. Sebagaimana dikemukakan oleh Tuti pengampu SDGs dari Kabupaten Pemalang bahwa

"kesulitan kami adalah karena minimnya kepedulian stakeholder, sebagai contoh di dalam pengupulan data dan koordinasi. Kami meminta data ke OPD, namun sampai hari ini hanya ada 3 OPD yang merespon meskipun dibentuk tim koordinasi SDGs yang berisi OPD dan perwakilan perguruan tinggi"

Di Kabupaten Pemalang sudah terbentuk tim koordinasi SDGs yang berisi OPD dan perwakilan perguruan tinggi. Bappeda Kabupaten Pemalang juga sudah melakukan inisiasi penyusunan matrik

SDGs sesuai form yang dibagikan tim Sekretariat SDGs Provinsi. serta mengadakan koordinasi dengan OPD sebanyak 3 kali, namun masih sulit mengumpulkan data. Kendala lain adalah sulitnya melakukan koordinasi dengan instansi non OPD Kabupaten Pemalang. Sampai saat ini belum dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal di Kabupaten Pemalang serta dengan organisasi nonpemerintahan yang terkait. Dengan demikian, program dan kegiatan dari lembaga vertikal dan nonpemerintah belum terinventarisasi. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan sedang dilakukan review terhadap RPJMD Kabupaten Pemalang periode 2016 - 2021. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk integrasi SDGs ke dalam program pemerintah daerah. Di Kabupaten Pemalang juga sudah menganggarkan penyusunan RAD SDGs, akan tetapi ada wacana kuat untuk dibatalkan karena sesuai ketentuan pemerintah, kabupaten/kota tidak diwajibkan menyusun RAD sebagaimana provinsi.

Di Kabupaten Pekalongan sesuai keterangan Hana (Sekretariat SDGs) bahwa "pelaksanaan SDGs di Kabupaten Pekalongan masih dalam tahap penataan, kami masih kesulitan karena minimnya peranserta OPD dan lembaga terkait lainnya. Di tahap awal kami masih kesulitan pengumpulan data, serta koordinasi dan sinergi kegiatan, terutama dengan instansi pusat. Banyak kegiatan mereka yang terkait dengan SDGs, namun kami mendapatkan data dan koordinasi karena mereka merasa tidak berada bawah koordinasi kami. Korodinasi dengan BPS sudah kami lakukan dalam rangka mendapatkan data sebagai bahan perumusan indikator daerah"

Dari aspek kelembagaan, saat ini belum terbentuk Tim Koordinasi SDGs yang melibatkan berbagai unsur. Surat Keputusan Kepala Bappeda tentang tim teknis pelaporan SDGs hanya terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan. Dalam hal penyusunan kegiatan juga belum dilakukan rapat koordinasi antar pihak yang terlibat dalam SDGs. Saat ini yang dilakukan adalah koordinasi dengan berbagai instansi vertikal seperti kejaksaan, pengadilan, BPS dan Polri di dalam rangka mengidentifikasi data dan capaian kegiatan. Kesulitan yang dihadapi terkait dengan lembaga nonpemerintah daerah adalah dalam mengintegrasikan kegiatan instansi vertikal tidak wewenang baginya untuk melakukan sinkronisasi data kegiatan beserta potensi sumber pendanaannya. Belum ada upaya melakukan koordinasi dengan pihak nonpemerintah/LSM dan perguruan tinggi. Sampai saat ini juga belum dilakukan identifikasi indikator yang sesuai dan sesuai pengisian matrik ketentuan provinsi. Hal tersebut dikarenakan masih adanya kebimbangan di dalam menentukan prosedur dan mekanisme

koordinasi pencapaian SDGs serta kegiatan yang harus dilakukan. Sebaga upaya kedepan, akan dilakukan kerjasama dengan BPS di dalam rangka menggali indikator SGDs yang sesuai.

Di Kabupaten Grobogan sebagaimana dikemukakan Priyo dari sekretariat SDGs, bahwa"

"SDGs di Kabupaten Grobogn belum terbentuk tim koordinasi maupun tim sekretariat. SDGs juga belum mendapatkan perhatian dari OPD terkait. Kami merasa bahwa SDGs dianggap sebagai pekerjaan Bappeda semata, sehingga hampir tidak ada kepedulian nyata dari OPD lain. Tetapi kami tetap mengupayakan implementasi sebaik mungkin, bahkan kami berencana menyusun RAD SDGs"

Dari pernyataan tersebut, permasalahan hampir sama yang dihadapi yaitu koordinasi dan pengumpulan data baik dari OPD Kabupaten Grobogan maupun dari instansi vertikal dan nonpemerintah. Di sisi lain, komitmen bisa kita lihat dari adanya rencana penyusunan RAD SDGs Kabupaten Grobogan.

Kondisi pelaksanaan SDGs di Kabupaten Wonosobo sebagaimana diungkapkan oleh Setyana (sekretariat SDGs), bahwa

"kami sudah beupaya seoptimal mungkin menjalankan SDGs Wonosobo, hanya saja kesulitannya menerjemahkan indikator SDGs ke dalam indikator daerah, sebagaimana sudah tertuang dalam RPJMD. Kami sudah berupaya menyusun tim, menyusun matrik kegiatan, pengumpulan data koordinasi. Memang kendalanya adalah partisipasi stakeholder yang masih kurang"

Sesuai dengan hasil FGD dengan berbagai OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa salah satu kesulitan dalam mengumpulkan data adalah karena OPD kesulitan memahami konsep target dan indikator. Terdapat banyak target dan indikator SDGs yang umum maupun sepesifik, di sisi lain banyak kegiatan OPD yang tidak kongruen dengan konsep indikatornya sementara kegiatannya terkait. Oleh sebab itu perlu fasilitasi terhadap OPD untuk indikator memahami atau membuat formulasi indikator proksi yang disusun bersama antara Bappeda dan OPD terkait. disampaikan Prof. Sebagaimana Fatimah Muis, M. Sc dalam FGD, perlu ada formulasi antara data dan indikator dalam kegiatan OPD yang sejalan dengan SDGs, serta pemutakhirannya di setiap tahun.

Kondisi di atas, relatif sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya. Sesuai dengan hasil penelitian Aidha, dkk (2019) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa:

"ditemukan banyak kesamaan situasi kondisi kelembagaan pelaksanaan program/kegiatan SDGs misalnya terkait anggaran khusus mendukung untuk pencapaian indikator-indikator SDGs. belum optimalnya sosialisasi, belum programoptimalnya harmonisasi program pemerintah daerah dalam rangka melihat keterkaitan antara setiap tujuan di dalam SDGs, belum ada upaya harmonisasi data dari satu OPD ke OPD lain, belum siapnya alat ukur dan alat monitoring dalam pelaksanaan SDGs di daerah karena terdapat beberapa indikator SDGs yang pengukurannya tidak dilakukan di tingkat daerah (hanya bisa di tingkat Nasional) dan belum terbangunnya sebuah platform kerjasama melibatkan yang multipihak baik Pemerintah, pihak swasta, **CSO** dan Perguruan Tinggi/Akademisi".

### Pembahasan

Sesuai dengan fenomena yang disampaikan di atas, di dalam penyusunan RAD SDGs perlu memperhatikan berbagai isu dan hasil kajian terdahulu. Proses RAD SDGs tahun 2018-2023 tentu berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya menggunakan taging dari yang sudah ada di dalam RPJMD dan RKPD maka penyusunan RAD kedepan sebaiknya berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan yang memperhatikan pedoman dan hasil kajian lembaga lain sebelumnya. Selain itu, integrasi **SDGs** dalam dokumen perencanaan pembangunan juga pemahaman membutuhkan beberapa komprehensif mengenai perencanaan. Sebagaimana dikemukakan Dr. Ahmad Syakir Kurnia, Ketua Departemen Studi Pembangunan UNDIP dalam FGD bahwa perencanaan memiliki dimensi sektoral dan spasial. Perencanaan yang komprehensif memadukan dimensi sektoral dan spasial tersebut.

**SDGs** merupakan konsensus negara-negara di dunia yang mengikat bagi semua negara, dimana Pemerintah Indonesia sudah mengikutinya sehingga daerah juga harus memiliki kepedulian terhadap konsensus tersebut. memiliki tujuan bersifat global, namun dalam tataran target dan indikator beberapa tidak tersedia data, atau konsep yang belum ada sehingga dikembangkan proksinya, bahkan beberapa ada yang tidak relevan. Di sisi lain dokumen RPJMD (dan juga RKPD) merupakan dokumen politik yang melibatkan kontrak politik. negosiasi, dan mengadopsi berbagai kepentingan lokal. Oleh sebab itu integrasi RAD SDGs dengan RPJMD harus memperhatikan berbagai dinamika serta dapat menerjemahkan visi misi kepala daerah

Hal ini menjadi tantangan bagi eksekusi RAD SDGs ada di dokumen perencanaan. Memperjelas bagaimana

posisi RAD SDGs apakah sama dengan dokumen perencanaan sektoral seperti RPJMD, atau spasial seperti RTRW. Masalahnya adalah bagaimana SDGs kemudiaan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan mengadopsi daerah yang bisa permasalahan sektoral dan spasial dalam jangka panjang.

Dalam mengintergasikan, ada beberapa tingkatan dokumen, yaitu RPJP, RPJMD, RKPD dan turunannya berupa APBD. Kemudian dalam tataran OPD terdapat dokumen renstra (5 tahunan), dan renja OPD (1 tahunan). RAD SDGs Jawa Tengah 2018 – 2023 akan mendampingi dokumen RPJMD sebagai paket kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, RAD SDGs sebagai dokumen nonpolitis yang perlu integrasi dengan RPJMD harus kongruen diantara keduanya. Satu sisi SDGs membawa misi global yang sebagian dijalankan dalam tataran lokal, di sisi lain RPJMD membawa misi lokal karena menerjemahkan visi misi kepala daerah, namun keduanya merupakan satu paket kienrja. Proses integrasi bisa berlangsung mempertimbangkan melalui proses /rujukan atau emboded. Pertama, dalam menyusun renstra dan renja OPD, dokumen RAD SDGs menjadi dokumen dipertimbangkan, dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Atau metode kedua. RAD diintegrasikan langsung di dalam RPJMD, kemudian renstra dan RKPD mengacu pada RPJMD, yang didalamnya sudah emboded target RAD SDGs. Pilihan kedua metode tersebut sangat tergantung dari pertimbangan politis di dalam penyusunan RPJMD.

Begitu pun menurut Dr. Rukuh Setiyadi, Dosen Departemen Perencanaan Wilayah Kota UNDIP dalam FGD bahwa indikator SDGs dalam RAD harus bisa dirumuskan dan dihitung. Semua indikator yang masuk dalam RAD SDGs adalah indikator yang mudah dihitung dan dilaksanakan. Sebagai kebijakan yang sifatnya inklusif, SDGs memuat indikator global yang tentunya memiliki kondisi berbeda di setiap daerah, oleh sebab itu dalam menerjemahkan indikator di ranah daerah harus mampu mengadopsi nilainilai lokal. Hal ini menjadi tugas tim sekretariat SDGs, ia harus sanggup mengakomodasi semua masukan baik dari tuntutan global, target nasional maupun kondisi lokal.

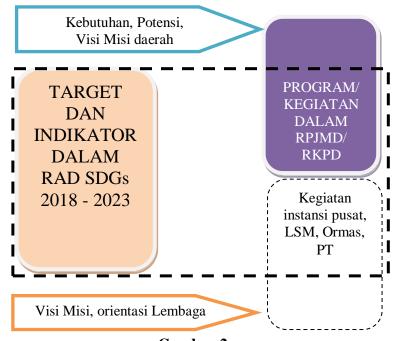
Penyusunan RAD SDGs juga harus melibatkan OPD terkait. Banyak fakta yang tidak terjelaskan dalam pembahasan RAD SDGs karena minimnya informasi. Sesuai pendapat Hotmauli Sidabalok, dosen Hukum Lingkungan UNIKA dalam FGD, bahwa dalam penyusunan RAD diperlukan FGD untuk melakukan *check and recheck* data, analisis data dan fakta yang ada, serta melibatkan penguruan tinggi saat melakukan penulisan RAD SDGs.

Menurut Samiran dari BPS Jawa menyampaikan pendapatnya Tengah. dalam FGD, SDGs perlu diawali dengan identifikasi indikator yang cocok untuk Jawa Tengah. Perlu diperhatikan juga urusan kewenangan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi biasanya sulit terpenuhi datanya, sehingga perlu memahami metadata nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang bisa diukur dan masuk dalam RAD. Data di tingkat nasional cukup banyak, namun akan berkurang untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini memang BPS telah melakukan pengumpulan data, tetapi tidak semua data bisa digunakan karena tidak selalu sesuai. Di tingkat nasional, berdasarkan data yang ada. bisa dikembangkan proksi indikator global berjumlah 241 menjadi 319, begitu juga di Jawa Tengah bisa dikembangkan proksi sesuai data yang ada, yang penting bisa

terukur. Perlu adanya peran aktif OPD dalam *support* data ini, selain data yang sudah disediakan BPS.

Sebagaimana dikemukkaan Prof Fatimah Muis (UNDIP), masalah data harus menjadi perhatian di daerah. Banyak fakta, kegiatan dan fenomena tidak terekam di dalam pendataan. Banyak kegiatan LSM yang tidak terekam, contoh berapa banyak LSM yang bergerak di bidang sosial. Banyak fenomena yang unreported, data tidak tercatat, contoh masalah stunting yang diukur hanya anak yang sekolah, lalu bagaimana yang tidak sekolah. Selain masalah data, menurutnya lainnya hal yang penting mempelajari indikator, parameternya, serta perlunya updating data di setiap periode tertentu. Bappeda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait perlu membahas indikator yang sesuai dan *updated*. Di dalam menyusun rencana aksi juga perlu mempelajari usulan program yang belum tercantum yang relevan, serta di dalam implementasinya mengembangkan terobosan-terobosan.

Berdasarkan konsep integrasi sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka target dan indikator di dalam RAD SDGs sebaiknya memuat semua kegiatan pemerintah mapun nonpemerintah. Dokumen perencanaan pembangunan sebagian daerah (RPJMD, RKPD) mengemban tujuan dan target SDGs, sebagian lagi memuat visi misi daerah. Begitu dengan lembaga juga pemerintah, sebagian memuat tuuan dan target SDGs, sebagian memuat orientasi dan visi misi lembaga.



Gambar 2 Skema Integrasi Traget dan Indikator SDGs dalam Perencanaan Pembangunan

Gambar di atas menunjukkan bahwa penyusunan RAD SDGs harus mengadopsi program dan kegiatan pemerintah daerah di dalam RPJMD maupun program dan kegiatan lembaga nonpemerintah daerah. RAD SDGs harus disinkronkan dengan kebutuhan, potensi dan visi misi daerah yang tertuang di dalam RPJMD dan APBD. Selain itu RAD juga harus memuat program dan

kegiatan lembaga non pemerintah daerah yang terkait dengan pencapaian SDGs agar tercipta sinerg.

Terkait dengan integrasi SDGs (RAD SDGs) ke dalam dokumen kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) dapat digambarkan sebagai sebuah kompromi antara visi misi kepala daerah, kebutuhan daerah dan tujuan SDGs, sehingga dokumen perencanaan selain mengembang visi misi dna kebutuhan daerah juga mengemban tujuan dan target SDGs.

Berdasarkan temuan sebelumnya, terdapat fenomena penyempitan makna RAD SDGs hanya sebatas program yang sesuai dengan RPJMD. Banyak kegiatan nonpemerintahan yang belum terakomodasi. Kesulitan pengumpulan data dari berbagai lembaga menjadi kendala utama, oleh sebab itu tim koordinasi perlu melakukan terobosan di dalam membangun komitmen berbagai pihak, terutama di dalam *sharing* program dan kegiatan yang mendukung SDGs.

Integrasi target dan indikator SDGs ke dalam perencanaan pembangunan daerah juga tidak terbatas pada RPJMD saja, namun setiap tahun perlu dilakukan evaluasi dan penajaman kembali. Program dan kegiatan di dalam RKPD harus selalu dievaluasi untuk diterjemahkan lebih lanjut ke dalam bentuk kegiatan di lapangan.

Integrasi **SDGs** dalam pembangunan daerah perencanaan dilakukan dengan pemahaman bahwa target dan indikator yang tertuang dalam RAD SDGs yang menjadi kewenangan pemerintah daerah merupakan amanat yang harus diwujudkan dalam kegiatan perangkat daerah, dengan demikian dalam menentukan target dan sasaran kegiatan wajib memperhatikan target dan indikator SDGs. Tantangan terberat adalah bagaimana membangun komitmen

penyelenggara pemerintah daerah dalam mensinergikan tuntutan SDGs hingga terwujud dalam kerangka program dan kegiatan mereka.

Selain tantangan di atas, berdasarkan penelitian Pribadi (2017) bahwa pencapaian SDGs memerlukan upaya kerjasama dan program lokal yang sesuai kebutuhan. Penelitian tentang bidang pencapaian SDGs dalam pendidikan di Papua, dimana terdapat permasalahan, infrastruktur, kualitas guru dan peserta didik, dilakukan kerjasama dengan organisasi lokal maupun internasional dengan menjalankan Program Sekolah Satu Atap (SATAP), Program Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan Terluar Tertinggal, Program Baca, Tulis, Hitung (Pribadi, 2017). Dari tersebut dapat penelitian ditarik kesimpulan tentang pentingnya kerjasama, serta inovasi program sesuai kebutuhan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di dalam pencapaian SDGs yang selama ini masih bertitik berat pada sumberdaya pemerintah dan program yang konvensional. Kerjasama menunjukkan adanya pengakuan pencapaian SDGs sebagai kebutuhan bersama.

### **KESIMPULAN**

Secara umum, isu strategis terkait dengan pencapaian tujuan SDGs di Jawa Tengah adalah masalah akses, pemerataan, efisiensi alokasi sumberdaya pemerintah (program, kegiatan, anggaran) agar lebih fokus pada kelompok sasaran miskin dan rentan. Banyak sumberdaya pemerintah daerah yang telah dikucurkan tidak tepat sasaran, sheingga terjadi inefisiensi. Pertumbuhan juga belum merata dan berkualitas sehingga kelompok miskin dan rentan hanya menikmati sedikit bagian pembangunan, dibanding kelompok non miskin.

Berdasarkan analisis data pada pembahasan di atas, maka dalam menjawab pertanyaan penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: Implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota masih belum berjalan optimal, dikarenakan terdapat penyempitan makna SDGs, hanya sebagai kegiatan Bappeda. Selain itu dalam penyusunan RAD masih terbatas pada taging program yang ada dalam RPJMD, serta belum mengadopsi program dari non pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Kendala lain adalah terkait lemahnya komtimen antar aktor, dalam kegiatan sharing perumusan program dan penyusunan rencana aksi. Tim sekretariat SDGs di Provinsi dan Kabupaten/Kota menemui kendala lemahnya akses terhadap data dan kegiatan, kesulitan program koordinasi, dan sinergi perumusan program untuk pencapian tujuan SDGs.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan, perlunya upaya menjadikan SDGs sebagai milik

bersama melalui sharing program, komitmen antar pihak, penguatan membangun tim solid dalam rangka penyediaan basis data (database) kegiatan, program komunikasi dan sinkronisasi di dalam penyusunan RAD SDGs yang dipimpin langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan kepada sebesar-besarnya terimakasih segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya penelitian penyusunan naskah ini, terutama kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta segenap jajarannya yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada para pakar dan narasumber. tim Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat SDGs Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan atas bantuan data dan informasi yang sangat berharga.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Aidha, Cut Nurul Dia Mawesti, Eka Afrina, Dwi Rahayu Ningrum Rahmanda M Thariq, Anggara Yudha Zunivar. 2019. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Tujuan SDGs No 1, 5 & 10: Baseline Study Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perkumpulan PRAKARSA. Jakarta
- Arikunto, Suharsini. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kajian Indikator Lintas Sektor; Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi. Ekonomi. Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Prenada Media Group
- Daniel, Moehar, Darmawati, Nieldalina.
  2005. PRA, Pendekatan Efekti
  Mendukung Penerapan
  Penyuluhan Partisipatif dalam
  Upaya Percepatan Pembangunan
  Pertanian.Jakarta. Bumi Aksara
- Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023. Bappeda Provinsi Jawa Tengah
- Fauzi, Akhmad dan Alex Oxtavianus. 2014. *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 68-83
- Hoelman, Mickael B., 2015. Bona Tua Parlinggoman Parhusip, Sutoro Eko, Sugeng Bahagijo, Hamong Santono. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*, November 2015. infid

- Ishartono dan Santoso Tri Raharjo. 2016.

  Sustainable Development Goals
  (SDGs) dan Pengentasan
  Kemiskinan. Social Work Jurnal
  Volume: 6 Nomor: 2 Halaman: 154
   272
- Panuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri. 2016. Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, Briefing Paper 02. Infid (September 2015-September 2016), Oktober 2016
- Pribadi, Roy Eka. 2017. Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Papua. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (3): 917-932
- SMERU Research Institute.2017.Dari MDGs Ke SDGs: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret, Buletin SMERU No. 2/2017.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2008. Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Akasara, Jakarta
- United Nations Development Programme

   Indonesia Report. 2015.

  Indicators and Data Mapping to
  Measure Sustainable Development
  Goals (SDGs) Targets Case of
  Indonesia 2015